

**Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka pengelolaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia
= The authority of central government and local government in the framework of geothermal resources management for indirect use in Indonesia**

Nababan, R. Kemala, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431044&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi urusan di bidang panas bumi menjadi salah satu penghambat optimalisasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Oleh sebab itu, pengaturan bahwa pengelolaan panas bumi kembali dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 adalah suatu langkah yang tepat.

<hr>This thesis discussing about geothermal resources management under the regulation before 2003, under the Law Number 27 of 2003 and the Law Number 21 of 2014. The focus of the analysis is the division of authority between the central government and local governments related to the utilization of geothermal in indirect use. The result of this analysis shows that the decentralization of geothermal resources management to the local governments has become one of the obstacles of its optimalization. Therefore, it will be better if the central government hold the authority of geothermal management, as already regulated by the Law Number 21 of 2014.